

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda strategis pemerintahan yang bertujuan untuk melakukan pembaruan dan transformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan harapan memberikan dampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan, peningkatan ekonomi serta kemampuan bersaing dengan negara lain (Yusriadi, 2020). Namun, dalam upaya untuk mengatasi isu-isu pembangunan nasional yang selama ini menjadi tantangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi tematik (Nufus, 2024). Konsep reformasi birokrasi tematik sebagai upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan.

Penerapan reformasi birokrasi tematik tidak terlepas dari peran reformasi birokrasi general yang berfokus pada masalah hulu terhadap peningkatan sistem dan proses dalam birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berstandar internasional, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, dan responsif (Henriyati Etih, 2021). Reformasi birokrasi selama ini telah berada pada jalur yang tepat menuju visi *world class bureaucracy* (Habibi, 2020). Pada tahun 2023 evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukkan hasil positif, dengan semakin banyaknya instansi pemerintah yang memiliki indeks reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dalam kategori baik (Rohman & Teguh Kurniawan, 2023). Berdasarkan data evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023, dari 624 instansi pemerintah yang dievaluasi, sebanyak 382 instansi pemerintah pusat dan daerah telah memperoleh predikat minimal baik. Secara lebih rinci, 26 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, dan 35 pemerintah kabupaten/kota berhasil meraih predikat A (Kementrian PANRB, 2023).

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan selama ini sering kali dianggap hanya terfokus pada perbaikan aspek tata kelola pemerintahan (Data Wardana 2021).

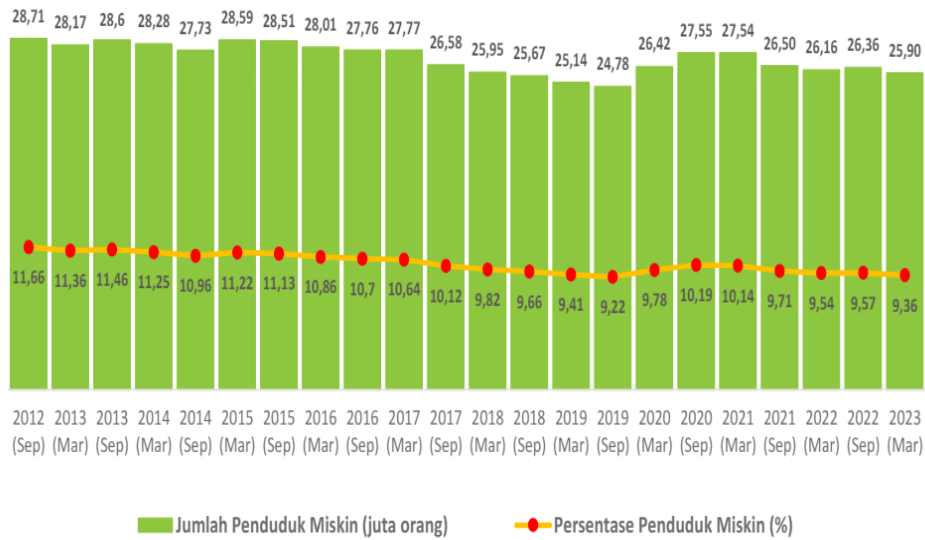
Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kekurangan dan kritik atas pencapaian reformasi birokrasi, di mana hasil yang diperoleh dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian pembangunan (Habibi, 2020). Selain itu, penilaian kemajuan reformasi birokrasi selama ini cenderung lebih menekankan pada proses dari pada hasil atau dampak yang dihasilkan. Pelaksanaan reformasi juga dianggap kurang kolaboratif, karena sering kali hanya melibatkan proyek-proyek yang dikerjakan oleh kementerian atau unit tertentu (Mugellini 2021). Dari kekurangan dan kritik tersebut, Kementerian PANRB melalui arahan Presiden, menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi tematik sebagai upaya strategis untuk menjawab permasalahan isu pembangunan nasional (Kementerian PANRB, 2023). Kebijakan ini bertujuan agar reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan tata kelola masalah hulu, tetapi juga menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau masalah hilir.

Reformasi birokrasi tematik dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada percepatan pencapaian dampak dari berbagai agenda isu strategis dan prioritas dalam pembangunan nasional, dengan mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan (Budiarjo, 2023). Pendekatan ini berfokus pada isu-isu spesifik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam road map reformasi birokrasi nasional yaitu meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden (Permenpanrb, 2023). Berdasarkan isu yang ada maka penelitian ini berfokus pada isu pengentasan kemiskinan yang terus menjadi salah satu masalah strategis nasional. Selama ini, penanganan terhadap kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai upaya dengan anggaran dan sumber daya yang besar mulai dari program-program seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), kartu indonesia pintar (KIP), jaminan kesehatan nasional (JKN), pengembangan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR), pemanfaatan momentum bonus demografi, dan lainnya (Sulhan & Sasongko, 2017).

Usaha yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan masih belum optimal dan memberikan dampak yang signifikan (Rizayani

et al., 2022). Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Indonesia dalam dua belas tahun terakhir menunjukkan penurunan angka, namun penurunan tersebut tidak begitu signifikan seperti terlihat pada gambar berikut.

Grafik 1.1 Data Kemiskinan Nasional 2012-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Dari gambar grafik 1.1 terlihat fenomena angka kemiskinan terus menurun, namun tren penurunan tersebut tidak signifikan. Sedangkan pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dan mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2021 anggaran untuk program pengentasan kemiskinan nasional pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun, dengan 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar di 16 kementerian dan lembaga. Namun, dengan anggaran sebesar itu, angka kemiskinan hanya turun sebesar 0,60% dari 10,14% pada Maret 2022 menjadi 9,54% pada Maret 2022 (Kemenpan, 2024). Selain itu angka kemiskinan ekstrem masih di angka 1,12 persen pada maret 2023. Kenaikan angka kemiskinan dikarenakan pembatasan mobilitas penduduk yang diberlakukan selama pandemi Covid-19, sehingga jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 dan September 2020 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Maka dalam penerapan strategi reformasi birokrasi tematik ini perlu untuk di optimalkan guna mengatasi akar permasalahan dalam tata kelola pengentasan kemiskinan, sehingga penyebab kurang optimalnya penanganan kemiskinan dapat terjawab dan terselesaikan. Optimalisasi reformasi birokrasi tematik juga menawarkan solusi yang lebih terarah dan sesuai dengan tantangan pembangunan nasional yang dihadapi masyarakat saat ini (Doramia Lumbanraja, 2022). Dengan memusatkan perhatian pada isu-isu spesifik berpeluang memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari itu, optimalisasi reformasi birokrasi tematik dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi pemerintah, sehingga pelaksanaan program strategis dapat berjalan secara terintegrasi dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pendekatan reformasi birokrasi tematik dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berfokus pada aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait reformasi birokrasi tematik. Salah satu penelitian yang berkaitan adalah *Thematic Bureaucratic Reform for Poverty Alleviation: Policies and Implementation Dynamics* (Budiarjo, 2023). Dalam penelitian tersebut menunjukkan kendala dan dinamika yang menjadi tantangan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik di Indonesia. Di antara kendala-kendala tersebut seperti resistensi internal dari birokrasi yang mungkin enggan mengubah praktik lama, kurangnya koordinasi antar instansi, dan adanya ketidak-konsistenan dalam kebijakan dari waktu ke waktu menjadi penyebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, teori tipe ideal birokrasi dari Max Weber menjadi landasan konseptual untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip rasionalitas, hierarki yang terstruktur, dan penerapan aturan serta prosedur yang jelas. Weber menjelaskan bahwa birokrasi yang ideal tidak hanya sekadar instrumen administratif, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan-tujuan besar secara efisien melalui koordinasi pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan menjadi esensial untuk memperbaiki tata kelola

pemerintahan, meningkatkan kolaborasi lintas instansi, dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara efektif.

Merujuk pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang bertujuan untuk memberikan dampak secara nyata dalam isu pembangunan nasional, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan "**Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang Berdampak pada Masyarakat.**" fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penerapan reformasi birokrasi yang lebih terfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan 7% dan 0% untuk kemiskinan ekstrem. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek dari reformasi birokrasi tematik yang mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka peneliti mengangkat rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Yang Berdampak Pada Masyarakat?
- 2) Apa faktor penghambat Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Yang Berdampak Pada Masyarakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Yang Berdampak Pada Masyarakat
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Yang Berdampak Pada Masyarakat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan struktural dalam birokrasi dapat mendukung efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian ini dapat mengungkapkan potensi peran birokrasi dalam memperbaiki distribusi sumber daya dan memastikan bahwa bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur mencapai mereka yang paling membutuhkan.

1.4.2 Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi pemerintahan, dan penelitian selanjutnya dalam merancang dan mengimplementasikan optimalisasi reformasi birokrasi tematik dalam upaya pengentasan kemiskinan secara lebih terarah dan efektif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada Kemenpan RB dan instansi terkait lainnya tentang cara mengoptimalkan birokrasi tematik dalam upaya mencapai birokrasi yang berkelas dunia. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman birokrat serta masyarakat luas mengenai pentingnya reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi dan pengentasan kemiskinan, yang pada akhirnya dapat membantu memperbaiki citra birokrasi publik di mata masyarakat.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1.5.1 Optimalisasi**

Optimalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai hasil atau target yang diinginkan secara efektif dan efisien. Optimalisasi melibatkan tindakan, proses, atau metode untuk membuat sesuatu, seperti desain, sistem, atau keputusan, menjadi lebih

baik, lebih lengkap, lebih fungsional, atau lebih efisien (Filya, 2018). Optimalisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau program kerja yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tujuan dari aktivitas tersebut dapat tercapai (Rio Febriant Rizaldy et al., 2024). Oleh karena itu, dalam melakukan suatu proses, diperlukan upaya maksimal sebagai sebuah proses, cara, dan tindakan untuk mencari solusi terbaik bagi berbagai masalah, dengan solusi yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Menurut Siringoringo (2005) mengatakan bahwa optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik. Namun, itu tidak selalu berkaitan dengan keuntungan tertinggi yang dapat dicapai dalam kasus di mana tujuan pengoptimalan adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau biaya terkecil yang dapat diminimalkan dalam kasus di mana tujuan pengoptimalan adalah untuk meminimumkan biaya. Optimalisasi memerlukan adanya alternatif keputusan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Alternatif keputusan disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi pengambil keputusan, sehingga setiap pilihan harus dianalisis secara cermat. Selain itu, sumber daya yang digunakan dalam proses ini merupakan bentuk pengorbanan yang harus dilakukan demi mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, proses optimalisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal dengan efisiensi sumber daya yang dimiliki.

### **1.5.2 Reformasi Birokrasi Tematik**

Reformasi birokrasi tematik adalah kolaborasi efektif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang dipokuskan pada isu startegis tatakelola pemerintahan (*governance*) yang bersifat lintas sektor atau lintas instansi pemerintah (*crosscutting*) yang *inline* dengan sasaran prioritas pembangunan nasional. Tujuannya untuk dapat menjadi daya ungkit kuat dalam mempercepat pencapaian reformasi birokrasi nasional yang berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan nasional dan indikator daya saing global. Dalam Permenpan RB Nomer 3 tahun 2023 reformasi birokrasi tematik yang selanjutnya disebut RB

Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab akar permasalahan dalam tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan (Kemenpan, 2024).

Melalui RB Tematik, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat lebih fokus mempercepat capaian kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema yang relevan (Deja 2023). Implementasi RB Tematik dilakukan di tingkat nasional oleh kementerian atau lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator (*leading sector*) serta instansi pelaksana (*implementing agency*). Sementara itu, untuk *non-implementing agency*, yaitu kementerian atau lembaga selain yang berperan sebagai *implementing agency* dan *leading sector*, dapat secara mandiri menginisiasi pelaksanaan RB Tematik sesuai tema yang telah ditetapkan di tingkat makro. Dalam reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola yang berkaitan langsung dengan isu prioritas nasional (Budiarjo, 2023).

Pendekatan RB tematik berfokus pada isu-isu spesifik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam road map reformasi birokrasi nasional yaitu meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Dalam penelitian ini difokuskan pada isu strategis pengentasan kemiskinan ditujukan untuk program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Adapun secara spesifik, di atur dalam Permenpan nomer 3 tahun 2023 terkait pendekatan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan berfokus pada aspek tata kelola melalui:

1. Perbaiki proses bisnis
2. Perbaiki data
3. Perbaiki regulasi/kebijakan
4. Reformulasi program/kegiatan yang lebih tepat sasaran
5. Penyediaan dukungan SPBE

### 1.5.3 Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap kebebasan dan kesempatan dalam hidup mereka. Menurut Rizayani (2022) kemiskinan bukan hanya sekadar keterbatasan dalam hal pendapatan atau kekurangan sumber daya materi, tetapi juga terkait dengan kekurangan dalam kemampuan individu untuk hidup secara bermartabat dan memiliki akses terhadap kesempatan yang adil. Pengentasan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dan menghilangkan kondisi kemiskinan di masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu serta kelompok yang terpinggirkan (Saputra 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019, pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya pembangunan yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi yang setara. Hal ini mencakup intervensi dalam bentuk program perlindungan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, pengentasan kemiskinan melibatkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengukur kemiskinan dari segi pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan public (Nurcahya & Alexandri, 2020). Upaya pengentasan kemiskinan harus berfokus pada pemberdayaan individu melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta pemberian kebebasan dan kesempatan dalam partisipasi sosial dan politik. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada pendapatan rendah atau kekurangan sumber daya, tetapi adanya keterbatasan dalam akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja (Alfisyahrin, 2021).

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1.6.1 Reformasi Birokrasi Tematik**

Reformasi birokrasi tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat (Rohman & Teguh Kurniawan, 2023). RB Tematik merupakan strategi percepatan dalam mewujudkan dampak nyata dari berbagai agenda prioritas pembangunan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurai serta menyelesaikan akar permasalahan dalam tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*), terutama yang berkaitan dengan berbagai isu tata kelola di tingkat hilir sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Implementasi RB Tematik dilakukan di tingkat nasional oleh kementerian atau lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator (*leading sector*) serta instansi pelaksana (*implementing agency*).

Kementerian PANRB dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi tematik yang mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada tata kelola pengentasan kemiskinan:

1. Perbaikan proses bisnis
2. Perbaikan data
3. Perbaikan regulasi/kebijakan
4. Reformulasi program/kegiatan yang lebih tepat sasaran
5. Penyediaan dukungan SPBE

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif berasal dari filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada kondisi obyek yang alamiah (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data triangulasi (gabungan) dengan pendekatan analisis induktif atau kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan detail mengenai aspek-aspek yang diteliti dalam

optimalisasi reformasi birokrasi tematik dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berdampak pada masyarakat.

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang karakteristik atau fenomena tertentu. Penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang Berdampak pada Masyarakat adalah untuk memaparkan bagaimana Kementerian PANRB melakukan tugasnya termasuk strategi yang diterapkan dalam pengelolaan pengentasan kemiskinan melalui reformasi birokrasi tematik ini.

#### 1.7.2 Subjek Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam menentukan subjek penelitian. Teknik purposive merupakan metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana subjek yang dipilih dianggap memiliki pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap topik yang diteliti. Subjek penelitian ini merupakan individu-individu yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan serta keterlibatan yang mendalam terkait dengan proses reformasi birokrasi tematik. Maka dari itu subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Agus Uji Hantara Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
- b. Bapak Cahyono Tri Birowo Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Ananda Putri Sujatmiko Analis Kebijakan Pertama
- d. Muthia Nur Rachmayanti Analis Kebijakan Pertama

### 1.7.3 Sumber Data

#### 1) Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terpercaya dan kredibel terkait topik melalui wawancara. Data primer tersebut diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari narasumber yang mana dilakukan secara langsung di Kementerian PANRB dan tidak langsung melalui platform zoom bersama narasumber dari Kementerian PANRB.

#### 2) Sekunder

Dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan Kemendagri, studi kasus, jurnal akademik, buku, artikel, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini.

- a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menerapkan strategi triangulasi dengan memanfaatkan berbagai jenis data. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berikut:

##### 1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena, perilaku, atau situasi yang sedang diteliti. Dalam proses observasi peneliti berperan sebagai pengamat yang aktif secara partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati dan secara non-partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Peneliti melakukan observasi lapangan di Kementerian PANRB dan melakukan observasi dari hasil sosialisasi reformasi birokrasi tematik, sosialisasi dan asistensi RB tematik dan talkshow RB tematik.

##### 2) Wawancara

Tahap wawancara melibatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau bahkan tidak terstruktur yang diberikan oleh pewawancara kepada responden yang kemudian mereka dapat memberikan penjelasan terkait dengan jawaban yang diutarakan. Proses wawancara dilaksanakan melalui berbagai macam pola pertama dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung, melalui video conference, atau bahkan melalui telepon bergantung ketersediaan pihak yang terlibat dalam proses wawancara tersebut.

Dalam skripsi ini wawancara dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan tidak langsung, yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan bagi penelitian. Pelaksanaan wawancara ini lebih memfokuskan terkait dengan aspek tata kelola reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Pengambilan data melalui wawancara ini dilaksanakan pada Deputi RBKUNWAS dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi bukti dan mendapatkan keakuratan data pada saat melakukan penelitian yang nantinya sebagai sumber acuan bukti kita untuk melengkapi keakuratan informasi atau data yang dibutuhkan saat penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen peraturan Menteri PANRB, Keputusan Menteri PANRB, paparan-paparan materi sosialisasi, implementasi dan monitoring yang berkaitan dengan tematik pengentasan kemiskinan, dan data artikel jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian.

#### 1.7.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang berlokasi di kantor pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Kementerian PANRB dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Selain itu, kementerian ini memiliki tugas khusus dalam menangani Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga menjadi objek yang relevan untuk penelitian ini.

### 1.7.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menafsirkan data yang diperoleh, baik dari temuan lapangan maupun informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Menurut Matthew B. Miles, A. Michael Huberman (2014) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut:

#### 1) Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta berfokus pada aspek-aspek penting untuk menemukan tema dan pola. Hasil dari reduksi data terdiri dari ringkasan dari catatan lapangan, yang mencakup catatan awal, perluasan, dan penambahan. Pada proses penelitian peneliti memilah data dari kumpulan data yang telah dikumpulkan berupa dokumen peraturan Menteri, keputusan Menteri dan paparan-paparan sosialisasi, monitoring dan implementasi selanjutnya dipilah mana yang dianggap relevan dengan penelitian tematik pengentasan kemiskinan. Selain itu, dari hasil wawancara kemudian dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan untuk data yang dianggap kurang relevan dengan tematik kemiskinan tidak disajikan dalam penelitian, sehingga penelitian memiliki batasan pada tema tematik pengentasan kemiskinan.

#### 2) Sajian data

Tahapan ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus serta menjadi acuan dalam pengambilan tindakan berdasarkan kemampuan dalam memahami dan mengevaluasi fakta yang telah disajikan. Selanjutnya, data yang telah diintegrasikan akan dijelaskan dan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok tertentu.

Menurut Sutopo, data dapat disajikan dalam bentuk narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kinerja, tabel, dan bentuk-bentuk lainnya. Maka penelitian ini menyajikan data-data yang memang relevan dengan penelitian berupa narasi hasil wawancara, gambar data, dan tabel data yang relevan dengan penelitian reformasi birokrasi tematik tema pengentasan kemiskinan.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses konfigurasi yang menyeluruh. Menarik kesimpulan, yang bertujuan untuk merangkum hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menggunakan data yang dikumpulkan dan diolah. Temuan yang diperoleh harus didukung oleh bukti-bukti yang substansial. Dalam proses menarik kesimpulan, peneliti mengikuti panduan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman, yang mencakup beberapa tahapan. Pertama, melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, atau observasi, dari hal tersebut peneliti mencatat temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

Setelah itu, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik, yang dilengkapi dengan narasi untuk menjelaskan hasil temuan. Berdasarkan analisis dan presentasi data, peneliti dapat menarik kesimpulan sementara yang akan terus berkembang seiring dengan penemuan baru yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang berkembang ini akan menjadi dasar bagi kelanjutan studi dan memberikan pemahaman yang lebih akurat dan komprehensif kepada pembaca serta peneliti mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.